

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintah yang berdaulat kemudian syarat sekundernya adalah mendapatkan pengakuan dari negeri lain. Kemudian sebuah Negara juga tidaklah lepas dari asas penyelenggaraan pemerintah di negara itu sendiri.

Khususnya di Indonesia penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki empat asas yaitu, sentralisasi, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Sentralisasi sendiri adalah dimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan atau kehendak dari pemerintah pusat, pada saat ini paradigma sentralisasi ini berubah menjadi desentralisasi atau kita masyarakat mengenalnya dengan sebutan otonomi daerah. Desentralisasi sendiri memiliki makna penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikuatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan

undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Bidang anggaran BPKAD kabupaten kuningan dalam wawancara menjelaskan bahwa realita dalam pelaksanaan pengambilan keputusan sendiri mengacu kepada pengambilan keputusan yang terstruktur, kemudian dalam perumusan anggaran sendiri dibentuklah TAPD dalam perumusanya. Dalam penyusunan APBD sendiri TAPD menyelenggarakan Musrembang desa kecamatan dan kabupaten setelah itu masuk ke RKPd setelah itu masuk KUA yaitu kebijakan umum APBD, didalam kebijakan ini dibahas juga PPAS yaitu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, kemudian dihimpunlah semua anggaran berdasarkan KKD kemampuan keuangan daerah karena pada dasarnya semua SKPD semua permintaannya ingin dipenuhi.

Dalam *Statement of financial Accounting concept No.2, Financial Accounting Standarts Board* mendefinisikan akuntansi sebagai system informasi. Di dalam standar akuntansi keuangan tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Oleh sebab itu bukanlah hal yang mengherankan apabila *Accounting Education Change Commision* merekomendasikan bahwa kurikulum akuntansi harus menekankan bahwa akuntansi suatu proses identifikasi, pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Komisi tersebut menyarankan agar akuntansi harus dirancang untuk memberi sebuah pemahaman yang kuat atas tiga konsep dasar

berikut 1). Pemakai informasi didalam pengambil keputusan, 2). Sifat, desain, pemakaian dan implementasi SIA, 3). Pelaporan informasi keuangan

Dibidang akuntansi, system pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer banyak ditawarkan oleh perusahaan jasa yang bergerak dibidang system maupun pemerintah yang telah memiliki system perencanaan keuangan khusus daerah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji

Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk mengelola keuangan daerah sendiri diperlukannya sebuah sistem atau aplikasi untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang berlaku di pemerintah saat ini disebut SIPKD yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Kuningan.

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang disingkat SIPKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah.

selain itu dijelaskan pula informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitas dari Kementrian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi, Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan saat ini (Sri Dewi Wahyundaru, 2001).

Dalam situs resmi HUMAS SETDA Kabupaten Kuningan Menjelaskan sosialisasi kebijakan akuntansi “Kegiatan Sosialisasi tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan agar semua pengguna anggaran dan

pelaksana anggaran, dalam melaksanakan pencatatan maupun penatausahaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikatakan ketua pelaksana. Dalam kesempatan itu ketua pelaksana mengatakan pengelolaan keuangan daerah pada intinya mengharuskan Pemerintah Daerah mempunyai dan melaksanakan system pengelolaan keuangan yang baik. Adapun pondasi utama pelaksanaan manajemen keuangan adalah terlaksananya system akuntansi sebagai suatu sistem yang dapat menghasilkan dan menyajikan laporan yang dapat digunakan sebagai sarana membantu perencanaan, alat pengendalian dan pertanggungjawaban serta pengambilan keputusan yang tepat.”

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan (Penelitian Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penerapan informasi pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sector publik akan berpengaruh terhadap kinerja pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi setelah penerapan sistem informasi akan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan kinerja pengambilan keputusan sebelum penerapan sistem informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah kabupaten Kuningan.
2. Bagaimana pengambilan keputusan pada pemerintah kabupaten Kuningan.
3. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap pengambilan keputusan pada Pemerintah Kabupaten setempat.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk membantu pencapaian tujuan penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengambilan keputusan pada pemerintah kabupaten Kuningan.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap kinerja pengambilan keputusan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian penulis paparkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai penerapan sistem informasi akuntansi, dan pengaruhnya pada pengambilan keputusan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah solusi dan rekomendasi untuk upaya peningkatan penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan khususnya di pemerintah daerah dalam mengelola pengelolaan keuangan daerah.